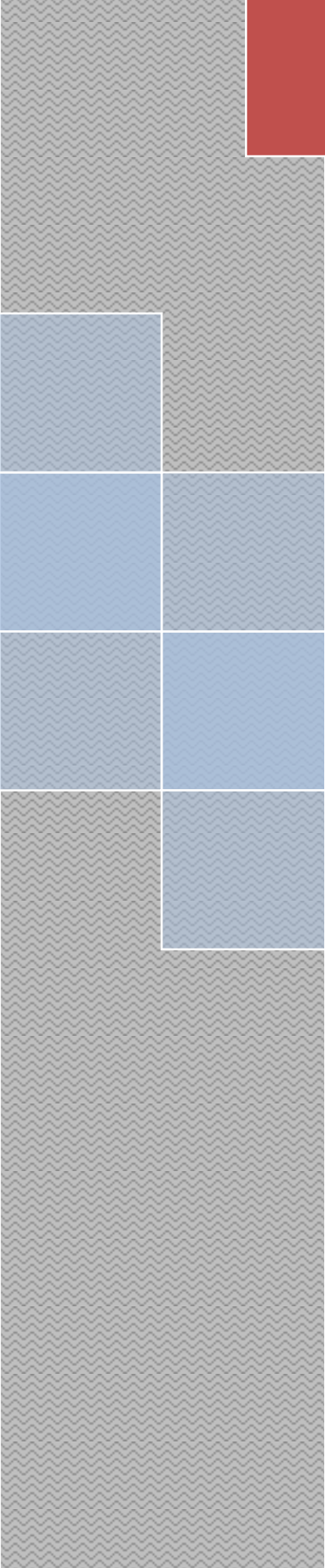




RENCANA STRATEGIS

RENSTRA 2016 - 2021

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2016



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga bisa tersusunnya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur periode 2016 – 2021.

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Luwu Timur, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur, Renstra Kementerian Dalam Negeri, Renstra Badan KesbangPol Provinsi Sulawesi Selatan dan Visi, Misi Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Terpilih.

Dokumen Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Periode 2016 – 2021 merupakan dokumen berisi ungkapan seluruh aktifitas yang akan dilakukan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur selama 5 (lima) tahun ke depan meliputi : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan serta Program Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Demikian Dokumen Renstra ini kami sajikan, kiranya dapat bermanfaat sebagai landasan kerja dan evaluasi perbaikan dimasa yang akan datang. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Dokumen Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur.

Malili, Januari 2018

Kepala Kantor



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD.....	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD.....	7
Gambar 1.....	9
2.2 Sumber Daya SKPD.....	14
2.2.1 Jumlah Pegawai.....	14
Tabel 2.2.1.....	14
Tabel 2.2.2.....	15
2.2.2 Aset/Modal.....	15
Tabel 1.....	15
2.3 Kinerja Pelayanan.....	16
Tabel 2.3.1.....	17
Tabel 2.3.2.....	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.....	23
BAB III PERMASALAHAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH....	25
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan SKPD.....	25
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati.....	26
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi.....	27
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	28

	Tabel 3.4.1.....	29
3.5	Penentuan Isu – Isu Strategis.....	30
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.....	31
	Tabel 4.1	31
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	32
	Tabel 5.1.....	32
	Tabel 5.2.....	33
BAB VI	INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	34
	Tabel 6.1.....	34
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	42
	Tabel 7.1.....	42
BAB VIII	PENUTUP.....	43

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan kewajiban setiap SKPD untuk menyusun sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki fungsi dalam pembangunan daerah sebagai arah kebijakan dan strategi pembangunan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyusun program prioritas dan kegiatan tahunan selama periode 2016 – 2021 sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kabupaten Luwu Timur, dengan tugas dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 27 Tahun 2008 Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur.

Proses penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur tahun 2016 – 2021 didasarkan atas beberapa tahap dan sumber data pokok yaitu :

- a. Data sekunder yaitu data – data yang mencakup Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dan acuan dokumen perencanaan lainnya.
- b. Proses pendekatan partisipatif yang melibatkan partisipasi kalangan masyarakat (stakeholders) melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).
- c. Proses Bottom-Up dan Top-Down yaitu perencanaan yang aliran prosesnya dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah atau dalam hirarki pemerintahan melalui musyawarah Forum Renstra SKPD di bawah koordinasi Kepala SKPD sebagai uji public atas rancangan kebijakan pelayanan SKPD.

Dokumen Rencana Strategis SKPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur serta berpedoman kepada Perencanaan dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dan Rencana Strategis Badan KesbangPol Propinsi Sulawesi Selatan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Luwu Timur dan Wakil Bupati Luwu Timur yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan memperhatikan RPJM Nasional, yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana – rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Selanjutnya Renstra-SKPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur setiap tahun akan diperjelas dengan penjabaran yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD mengenai teknis pelaksanaan masing-masing program kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur disusun berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan KesbangPol dan Pembangunan daerah yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD);
- k. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tanggal 10 Oktober 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Kantor Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 05 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Timur periode 2005-2025;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur periode 2011 – 2015;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas- Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 3) Sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 35);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005– 2025 (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021.
- q. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur.
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik **dimaksudkan** sebagai pedoman untuk mencapai visi dan misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang sudah ditetapkan dengan mengacu terhadap program kerja Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur sehingga mencapai keharmonisan perencanaan pembangunan yang menyeluruh dan sinergis dengan sector lain dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

- a. Sebagai dokumen perencanaan komprehensif yang menjamin konsistensi perumusan kondisi dan masalah daerah yang ada saat ini, perencanaan arah kebijakan, pembuatan strategi, sampai kepada pemilihan program strategis yang sesuai guna mengatasi isu yang berkembang sesuai tuntutan kebutuhan daerah atas program – program dan kegiatan pembangunan.
- b. Sebagai acuan utama dalam melaksanakan program – program pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan yang dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2016 sampai dengan 2021.
- c. Sebagai alat untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, karena perencanaan yang tertuang di dalam renstra harus sesuai dengan yang diperlukan oleh masyarakat Luwu Timur.
- d. Sebagai dasar bagi Bupati Luwu Timur dalam mengukur dan menilai kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur pada setiap akhir pelaksanaan tahun anggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan naskah rencana Strategi (Renstra) SKPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD) yang terperinci atas beberapa bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur OPD
- 2.2 Sumber Daya OPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan OPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan OPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah & Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD
- 4.2 Strategi dan Kebijakan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN

BAB VII KINERJA OPD YANG MENGACU PADA SASARAN & TUJUAN RPJMD

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Ruang lingkup peranan (tugas dan fungsi) SKPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2016, dengan tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, bidang ketahanan dan kewaspadaan, dan bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pada dasar gambaran pelayanan SKPD meliputi berbagai kebijakan, program dan rencana kerja pelaksanaan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Untuk menunjang tugas dan fungsi SKPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur di dukung tenaga sebanyak 18 (Delapan belas) orang mulai dari jenjang SMU sampai dengan Strata 2.

Agar lebih efektifnya layanan terhadap masyarakat di wilayah Kabupaten Luwu Timur yang cukup luas maka keberadaan SKPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Luwu Timur agar lebih memudahkan masyarakat bila ingin berkunjung.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

Tugas : Membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa;
2. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Politik;
3. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah kabupaten;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

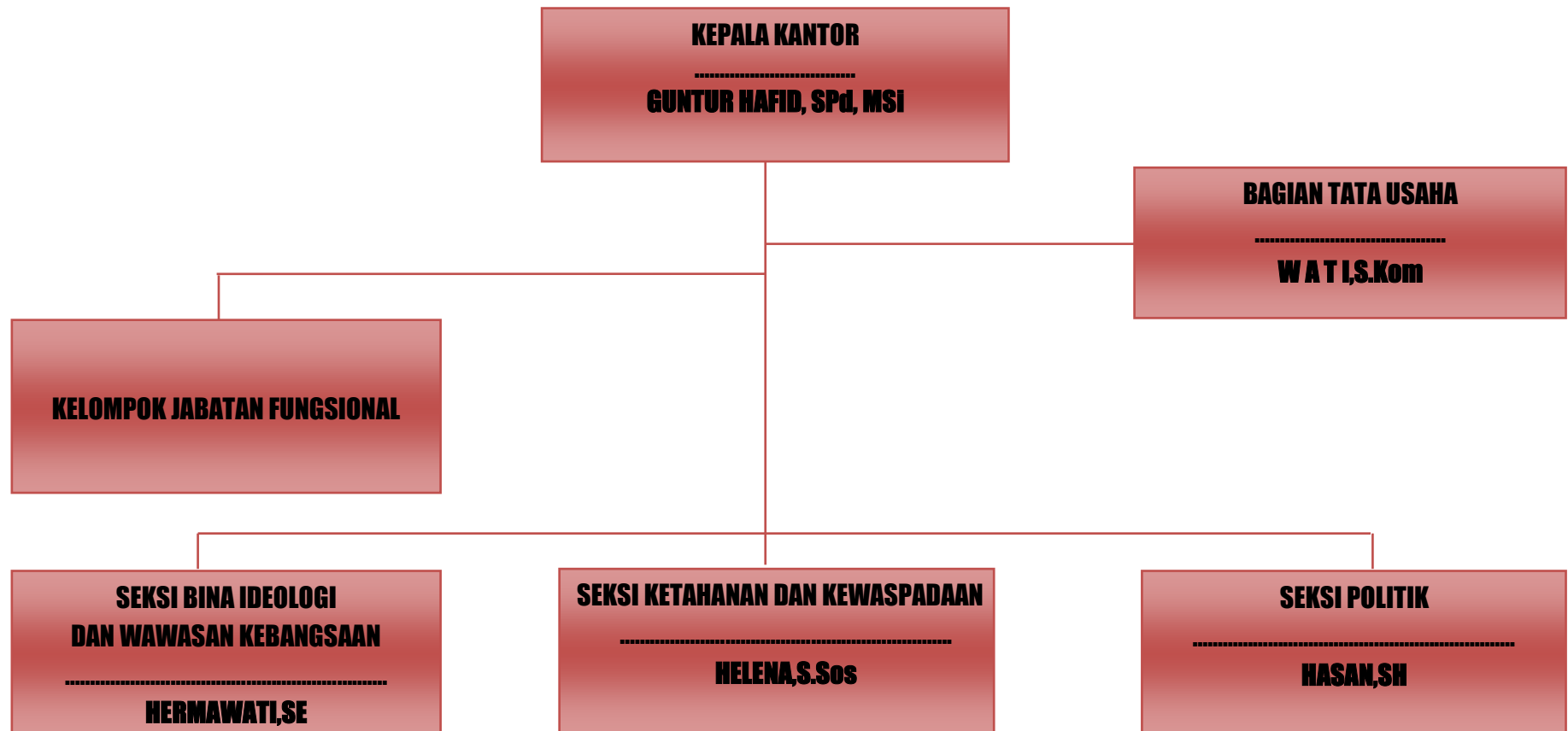
2.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi adalah suatu gambaran tentang hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu dengan cara menetapkan hubungan antar pegawai yang melaksanakan tugasnya, sehingga memegang peranan penting dalam pembagian fungsi – fungsi dan wewenang serta tanggungjawab dalam hubungan kerjasama antara satu dengan yang lainnya.

Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor;
2. Kasubag Tata Usaha;
3. Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
4. Seksi Politik;
5. Seksi Ketahanan dan Kewaspadaan;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1. Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik



URAIAN TUGAS

Kepala Kantor, mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan penyelenggaraan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Membina dan Mengarahkan Kepala Bagian Tata Usaha dan para Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya;
3. Melakukan Pembinaan terhadap kedisiplinan Pegawai dalam lingkup Kantor;
4. Melakukan upaya pembinaan dan peningkatan Kualitas Sumber Daya Pegawai dalam lingkup Kantor;
5. Melakukan pembinaan & pengendalian atas pengelolaan keuangan dan penerimaan Kantor;
6. Melakukan pembinaan & pengendalian atas pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
7. Menilai prestasi kerja Kepala Bagian dan Kepala Seksi dalam rangka pembinaan dan Pengembangan karir;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kasubag Tata Usaha, mempunyai uraian tugas :

1. Menyusun program dan rencana kerja Bagian Tata Usaha sebagai Pedoman dalam Pelaksanaan Tugas;
2. Melaksanakan Surat Menyurat untuk Kepentingan Dinas;
3. Menerima, meneliti, mangagenda dan mendistribusikan surat-surat masuk dan surat keluar;
4. Melakukan pengarsipan surat-surat dinas dan dokumen lainnya;
5. Mengelola Urusan Rumah Tangga, Keprotokoleran, Administrasi Keuangan, Administrasi Kepegawaian dan Administrasi Perlengkapan dan Peralatan;
6. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan Program / kegiatan; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala kantor dan melaporkan hasilnya kepada kepala kantor.

Kepala Seksi Politik, mempunyai uraian tugas :

1. Mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan Fasilitasi Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan;
2. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana kegiatan Fasilitasi Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan;
3. Menyusun rencana pelaksanaan Program dan Kegiatan – Kegiatan fasilitasi parpol dan ormas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
4. Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program / kegiatan kegiatan fasilitasi Parpol dan Ormas;
5. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas kegiatan kegiatan fasilitasi parpol dan ormas;
6. Melakukan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik. Kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilihan umum dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, pemilihan presiden dan pemilihan umum kepala daerah;
7. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilihan umum dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, pemilihan presiden dan pemilihan umum kepala daerah;
8. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi;
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan; dan
10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.

Kepala Seksi Ketahanan dan Kewaspadaan, mempunyai uraian tugas :

1. Mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan di bidang ketahanan dan kewaspadaan;
2. Menyusun rencana kegiatan di bidang ketahanan dan kewaspadaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

3. Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang ketahanan dan kewaspadaan;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang ketahanan dan kewaspadaan;
5. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan dan kewaspadaan;
6. Melakukan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
7. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
8. Melakukan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
9. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
10. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi;
11. Melaksanankan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan; dan
12. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor melalui Kepala Subbagian Tata Usaha;

Kepala Seksi Bina Ideologi & Wawasan Kebangsaan, mempunyai uraian tugas :

1. Mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
2. Menyusun rencana kegiatan di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

3. Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
4. Melakukan kegiatan di bidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai – nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
5. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai – nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
7. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas kegiatan di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
8. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi;
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan; dan
10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor melalui Kepala Subbagian Tata Usaha;

Kelompok jabatan fungsional, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai keahlian.

Peran Organisasi

Peran Kantor Kesatuan Bangsa & Politik yaitu Membantu Kepala Daerah dalam hal Sbb :

1. Menegakkan Peraturan Daerah.
2. Menciptakan kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman.
3. Mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.
4. Menciptakan kerukunan antar umat beragama di wilayah kabupaten luwu timur.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perpolitikan daerah.
6. Meningkatkan kesadaran Ormas, LSM dalam partisipasi pembangunan di wilayah kabupaten luwu timur.
7. Meningkatkan pengetahuan bagi para pengurus partai politik dalam membuat laporan pertanggungjawaban bantuan dana partai politik.

2.2 Sumber Daya SKPD

Sumber daya Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur berjumlah sebanyak 8 (Delapan) Orang Pegawai Negeri Sipil dan 10 (Sepuluh) Orang Upah Jasa dengan ragam jenjang / tingkatan pendidikan yang berbeda-beda.

2.2.1. Jumlah Pegawai

Tabel 2.2.1
Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Menurut Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	BANYAKNYA ORANG		JUMLAH
		PNS	HONORER	
1.	SD	-	-	-
2.	SLTP	-	-	-
3.	SLTA	1	1	2
4.	D.I	-	-	-
5.	D.II	-	-	-
6.	D.III	-	-	-
7.	S.1	6	9	15
8.	S.2	1	-	1
	JUMLAH	8	10	18

Tabel 2.2.2
Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Menurut Golongan dan Ruang

NO	GOL/RUANG	BANYAKNYA ORANG	PERSENTASE (%)	KET
1.	II/a	-	-	
2.	II/b	-	-	
3.	II/c	-	-	
4.	II/d	-	-	
5.	III/a	4	50	
6.	III/b	-	-	
7.	III/c	3	37,5	
8.	III/d	-	-	
9.	IV/a	1	12.5	
10.	IV/b	-	-	
11.	IV/c	-	-	
12.	IV/d	-	-	
13.	IV/e	-	-	
	JUMLAH	8	100	

2.2.2 Aset/Modal

Aset/Modal yang dimiliki Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur sampai dengan Desember tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel. 1
Aset/Modal Kantor Keatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Luwu Timur

No. urut	Nama Bidang/barang	Luas/Jumlah Barang	Keterangan
II	Peralatan dan Mesin		
	a. Alat-alat angkutan		
	- Mobil Toyota Avansa Velos	1 buah	Pembelian Tahun 2012
	- Kendaraan roda 2 (Susuki)	2 buah	Pembelian 2006 / rusak berat
	b. Alat Kantor dan alat rumah tangga		
	- Scanner	1 buah	Pembelian tahun 2015/ baik
	- AC	9 unit	2 Rusak berat
	- Mesin Ketik	4 buah	Rusak berat
	- Brand Kas	2 buah	1 baik
	- Lemari besi	2 buah	Pembelian tahun 2015 dan 2017
	- Filling Besi/ Metal	7 buah	Pembelian Tahun 2006
	- Lemari kayu	5 buah	Baik
	- Papan nama instansi	1 buah	Pembelian Tahun 2015
	- Papan Pengumuman	13 buah	2 di Kantor, 11 di kecamatan
	- Mesin Absensi	1 buah	Rusak berat
	- Genset	1 buah	Pembelian Tahun 2013
	- Meja Rapat	2 buah	Pembelian Tahun 2015
	- Kursi Sofa	2 Set	1 Set rusak berat
	- Kursi Putar	8 buah	2 rusak berat
	- Bangku Tunggu	1 set	Ada di ruang tunggu
	- Meja Komputer	3 buah	baik
	- Kursi lipat	28 buah	baik
	- Meja Kerja Biro/ Kayu	15 buah	baik
	- Kursi Kerja Futura	5 buah	baik
	- Lemari Es Merk Sanyo	1 buah	baik
	- Kipas Angin	4 buah	1 rusak berat
	- Televisi LG	1 buah	baik
	- Wireless	2 buah	Pembelian 2007 dan 2016
	- Camera Sony dan Canon	2 buah	baik

Tabel. 1
Aset/Modal Kantor Keatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Luwu Timur

No. urut	Nama Bidang/barang	Luas/Jumlah Barang	Keterangan
	- Komputer PC	4 unit	2 rusak berat
	- Laptop	12 buah	5 Rusak berat
	- Note Book Acer	1 Buah	Pembelian thn 2008
	- Printer	12 buah	6 Rusak berat
	- Proyektor	2 unit	1 Rusak Berat
	- Pesawat Telepon	1 buah	Pembelian tahun 2017
	- Radio H/FM (Handy Talky)	1 Set	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Tingkatan capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran / target Renstra SKPD periode sebelumnya rata – rata tiap tahunnya untuk serapan anggaran mencapai ± 80 %. Dari matrik data terlihat masih belum maksimal pencapaian target kinerja pelayanan SKPD. Itu dikarenakan jumlah sumber daya manusia pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik masih terbatas dan di samping itu keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki SKPD.

Matrik data pencapaian kinerja pelayanan SKPD selengkapnya dapat dilihat dalam form tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD dan form tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD sebagai berikut :

RENCANA STRATEGIS DAERAH (RENSTRA) TAHUN 2016-2021

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Luwu Timur

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SP M	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase rata – rata surat yang tersampaikan	-	-	-	90	90	0	0	0	69.23	64.17	0	0	0	76.66	71.11	0	0	0
2	Jumlah rekening yang dibayarkan				2 rekening	3 rekening	4 rekening	4 rekening	3 rekening	2 rekening	3 rekening	4 rekening	3 rekening	3 rekening	100	100	100	75	100
3	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara				19 unit	20 unit	51 unit	59 unit	72 unit	19 unit	20 unit	51 unit	59 unit	72 unit	100	100	100	100	100
4	Jumlah bangunan kantor yang dibersihkan				1 unit	1 unit	0	0	0	1 unit	1 unit	0	0	0	100	100	0	0	0
5	Jumlah gedung kantor yang diberikan penerangan				1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	100	100	100	100
6	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor				60 unit	31 unit	8 unit	13 unit	9 unit	60 unit	31 unit	8 unit	13 unit	7 unit	100	100	100	100	77.77
7	Jumlah Koran/majalah yang disediakan				5 buah	4 buah	5 buah	5 buah	4 buah	4 buah	3 buah	4 buah	4 buah	4 buah	90	75	80	80	100
8	Jumlah rakor yang dilaksanakan				58 kali	52 kali	42 kali	42 kali	36 kali	56 kali	50 kali	40 kali	40 kali	36 kali	96.55	96.15	95.23	95.23	100
9	Jumlah upah jasa yang dibayarkan				7 orang	7 orang	7 orang	6 orang	6 orang	6 orang	6 orang	6 orang	6 orang	6 orang	90	85.71	85.71	100	100
10	Persentase rata – rata capaian penunjang SKPD				90	90	100	100	95	90.67	84.77	88.95	67.63	90.28	100	94.44	89	68	94.73
11	Jumlah pengadaan kendaraan dinas				0	1 unit	0	0	0	0	1 unit	0	0	0	0	100	0	0	0
12	Jumlah gedung kantor yang dipelihara				1 unit	1 unit	1 unit	0	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	0	1 unit	100	100	100	0	100
13	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara				3 unit	3 unit	3 unit	1 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	1 unit	3 unit	100	100	100	100	100
14	Jumlah gedung kantor yang di rehab				0	0	0	1 unit	0	0	0	0	1 unit	0	0	0	0	100	0

RENCANA STRATEGIK DAERAH (RENSTRA) TAHUN 2016-2021

15	Jumlah sosialisasi peraturan perundang – undangan parpol				0	1 kali	0	0	0	0	1 kali	0	0	0	0	100	0	0	0
16	Jumlah pegawai yang diberikan pakaian dinas				6 orang	0	0	0	0	6 orang	0	0	0	0	100	0	0	0	0
17	Jumlah pegawai yang diberikan pakaian olahraga				6 orang	0	0	0	0	6 orang	0	0	0	0	100	0	0	0	0
18	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek				7 orang	8 orang	8 orang	9 orang	9 orang	7 orang	8 orang	8 Orang	9 orang	9 orang	100	100	100	100	100
19	Jumlah pegawai yang mendapat uang lembur				0	8 orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan keamanan lingkungan				264 orang	264 orang	0	0	0	264 orang	0	0	0	0	100	0	0	0	0
21	Jumlah pemantauan orang asing yang dilakukan dalam satu tahun				28 kali	28 kali	16 kali	46 kali	32 kali	20 kali	20 kali	16 kali	40 kali	32 kali	71.42	71.42	100	86.95	100
22	Jumlah pertemuan kominda yang dilakukan				6 kali	4 kali	6 kali	4 kali	2 kali	3 kali	3 kali	4 kali	2 kali	2 kali	50	75	66.66	50	100
23	Jumlah pertemuan yang dilakukan terhadap penanganan keamanan dalam negeri				0	0	0	4 kali	2 kali	0	0	0	1 kali	1 kali	0	0	0	25	50
24	Jumlah pemantauan yang dilakukan terkait pencegahan tindak kejahatan				0	0	70 kali	11 kec	0	0	0	0	11 kec	0	0	0	100	0	0
25	Jumlah pertemuan FKUB yang dilakukan				3 kali	4 kali	4 kali	5 kali	2 kali	2 kali	2 kali	3 kali	2 kali	1 kali	66.66	50	75	40	50
26	Jumlah peserta yang ikut dalam kegiatan perkemahan				10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	0	0	0	10 orang	10 orang	0	0	0	100	100
27	Jumlah pertemuan FPK yang dilakukan				0	0	2 kali	2 kali	2 kali	0	0	2 kali	2 kali	0	0	0	100	100	0
28	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan FKDM				130 orang	130 orang	1 kali	1 kali	1 kali	100 orang	100 orang	1 kali	1 kali	1 kali	0	0	100	100	100

RENCANA STRATEJIK DAERAH (RENSTRA) TAHUN 2016-2021

29	Persentase pelaporan yg cepat, tepat dan akurat				95	95	0	0	0	88.26	75.66	0	0	0	92.63	80	0	0	0
30	Jumlah pemantauan yang dilakukan				0	50 kali	36 kali	30 kali	60 kali	0	50 kali	30 kali	30	58 kali	0	100	83.33	100	96.66
31	Jumlah pertemuan ormas dan lsm yang dilakukan				2 kali	2 kali	1 kali	3 kali	1 kali	1 kali	2 kali	0	2 kali	1 kali	50	100	0	66.66	100
32	Jumlah bimtek bagi bendahara parpol yang dilakukan				0	0	0	1 kali	0	0	0	0	1 kali	0	0	0	0	100	0

RENCANA STRATEGIK DAERAH (RENSTRA) TAHUN 2016-2021

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Luwu Timur

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung	404.722.511	600.681.161	725.655.100	753.434.177	741.925.727	378.154.645	528.049.103	625.877.261	610.056.944	613.988.656	93.44	87.91	86.25	80.97	82.76	64.52	55.12
Belanja Langsung																	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.950.000	1.800.000	0	0	0	1.350.000	1.155.000	0	0	0	69.23	64.17	0	0	0	7.50	5.10
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	11.820.000	35.000.000	36.000.000	27.600.000	28.200.000	4.041.643	19.096.476	24.091.881	19.279.857	13.300.739	34.19	54.56	66.92	69.85	47.17	27.72	15.96
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.800.000	16.000.000	5.000.000	7.700.000	10.000.000	8.800.000	11.090.000	4.765.000	7.700.000	9.195.000	100	69.31	95.30	100	91.95	95	83.10
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	13.693.800	4.688.200	0	0	0	2.590.450	4.131.100	0	0	0	18.92	88.12	0	0	0	36.76	13.44
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	1.297.500	2.295.078	2.500.000	1.000.000	4.200.000	1.297.500	1.988.750	2.209.400	1.000.000	3.850.000	100	86.65	88.38	100	91.67	22.58	20.69
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103.115.750	47.400.000	31.500.000	66.500.000	88.400.000	102.465.750	41.700.000	31.500.000	66.500.000	91.000.000	99.37	87.97	100	100	95.78	67.38	66.63
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.740.000	4.820.000	4.440.000	4.140.000	4.680.000	2.520.000	3.130.000	3.540.000	3.660.000	3.960.000	53.16	64.94	79.73	88.41	84.62	45.64	33.62
Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	182.289.000	156.560.000	127.815.000	210.745.000	121.720.000	182.044.800	106.206.700	105.113.900	165.566.938	121.255.300	99.87	67.84	82.24	78.56	99.62	15.98	13.63
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / teknis	78.000.000	90.000.000	78.000.000	78.000.000	90.000.000	78.000.000	75.000.000	78.000.000	69.720.000	71.000.000	100	83.33	100	89.38	78.89	82.80	74.34
Penyediaan Penunjang Administrasi Kesekretariatan SKPD	96.398.000	174.455.500	138.756.800	141.250.000	132.624.600	87.404.550	147.885.850	123.421.500	95.531.600	119.738.850	90.67	84.77	88.95	67.63	90.28	13.66	11.47
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0	208.000.000	0	0	0	0	189.900.000	0	0	0	0	91.30	0	0	0	41.60	37.98
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	10.000.000	21.000.000	36.000.000	0	15.000.000	6.644.500	19.282.000	31.348.000	0	14.999.000	66.45	91.82	87.08	0	99.99	16.40	14.45
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	19.500.000	22.350.000	19.459.600	13.441.700	16.250.000	13.024.000	14.934.000	17.726.400	11.326.700	12.737.900	66.79	66.82	91.09	84.27	78.39	18.20	13.94
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	2.350.000	0	0	0	0	2.350.000	0	0	0	0	100	0	0	0	0	47	47

RENCANA STRATEJIK DAERAH (RENSTRA) TAHUN 2016-2021

Kelengkapannya																	
Pengadaan Pakaian Khusus Hari – Hari Tertentu	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000	0	0	0	0	100	0	0	0	0	36	36
Sosialisasi Peraturan Perundangan – undangan Parpol	0	33.662.500	0	0	0	0	28.445.000	0	0	0	0	84.50	0	0	0	67.32	56.89
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Ktr	0	0	0	80.000.000	3.997.500	0	0	0	75.952.500	0	0	0	0	94.94	0	16.79	15.19
Bimtek dan Implementasi Peraturan Perundang - undangan	60.000.000	116.155.000	38.000.000	56.000.000	81.000.000	54.661.200	97.458.200	27.300.500	23.456.000	46.267.600	91.10	83.90	71.84	41.89	57.12	70.23	49.82
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	0	6.240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.48	0
Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	113.290.000	155.862.500	0	0	0	1.534.000	505.000	0	0	0	1.35	0.32	0	0	0	53.83	40.78
Forum Koordinasi Pengawasan Orang Asing serta Pemantauan Orang Asing, NGO & Lembaga Asing	10.755.000	57.408.500	22.523.600	25.497.600	19.527.200	3.035.000	16.420.500	12.357.300	15.649.200	18.474.200	28.22	28.60	54.86	61.38	94.61	27.14	13.18
Fasilitasi Penguatan Jaringan Intelijen Daerah (KOMINDA)	62.565.000	91.016.500	134.169.800	75.320.000	73.755.000	49.207.000	61.287.400	86.024.000	34.109.800	58.852.700	78.65	67.34	64.12	45.29	79.79	87.36	57.89
Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri	0	0	0	49.232.000	70.152.000	0	0	0	5.830.000	47.341.200	0	0	0	11.84	67.48	23.87	10.63
Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	0	0	148.951.000	108.762.500	0	0	0	0	108.689.900	0	0	0	0	99.93	0	51.54	21.73
Peningkatan Toleransi & Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	46.745.000	131.197.000	144.901.800	129.930.000	84.430.000	45.315.000	52.550.000	122.236.800	101.682.200	41.043.200	96.94	40.05	84.36	78.26	48.61	10.74	72.56
Perkemahan Persaudaraan Generasi Muda Sel - Sel	18.000.000	0	0	29.030.000	27.700.000	0	0	0	17.200.000	18.780.000	0	0	0	59.25	67.80	14.94	7.19
Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	0	0	29.193.400	45.260.000	72.900.000	0	0	23.039.900	31.627.100	7.446.800	0	0	78.92	69.88	10.22	29.47	12.42
Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	21.985.000	59.113.500	35.546.800	30.860.000	49.080.000	0	41.299.000	22.456.600	15.025.000	18.948.600	0	69.86	63.17	48.69	38.61	39.31	19.54
Pemantauan Pemilukada 2013/Perkembangan Politik Daerah	0	0	21.459.000	92.057.500	149.590.000	0	0	15.094.500	88.864.000	133.646.400	0	0	70.34	96.53	89.34	52.62	47.52

RENCANA STRATEJIK DAERAH (RENSTRA) TAHUN 2016-2021

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	5.490.000	14.144.000	0	0	0	4.845.500	10.678.000	0	0	0	88.26	75.66	0	0	0	39.26	31.04
Fasilitasi Sukses Pilkada 2013	0	53.177.500	0	0	0	0	21.719.000	0	0	0	0	40.84	0	0	0	10.63	43.43
Forum Komunikasi dan Pertemuan Berkala Ormas, LSM dengan Pemerintah Daerah	34.753.000	59.200.000	36.043.400	0	35.490.000	33.855.000	4.020.000	0	0	29.983.300	97.42	6.79	0	0	84.48	33.09	13.57
Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi Parpol, Ormas dan LSM	0	0	26.626.200	17.900.000	26.550.000	0	0	18.475.000	11.155.000	19.295.200	0	0	69.39	62.32	72.67	14.21	9.78
Bimtek Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan bagi Bendahara Parpol	0	0	0	21.215.000	0	0	0	0	19.145.000	0	0	0	0	90.24	0	42.43	38.29

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Berdasarkan paduserasi Renstra SKPD terhadap Renstra baik Kementerian Dalam Negeri, Renstra Provinsi dan sumber data – data perencanaan yang relevan dengan penyajian renstra maka pengembangan pelayanan SKPD untuk waktu 5 (lima) tahun kedepan dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Tantangan

1. Letak Geografis Kabupaten Luwu Timur yang mempunyai daerah perbatasan yang sangat rawan penyelundupan, gangguan kantibmas dan terorisme.
2. Adanya pergesekan antar masyarakat maupun antar kelompok yang dilatar belakangi perbedaan Suku, Ras dan Agama.
3. Menurunnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup berbangsa dan bernegara.
4. Adanya krisis kepercayaan terhadap aparat pemerintah.
5. Jumlah sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan SKPD belum memadai baik dari segi kuantitas dan kualitas, mengingat arealnya cukup berjauhan.
6. Adanya keterbatasan sumber daya manusia pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sehingga dalam menjalankan tugas masih belum optimal.

B. Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Letak strategis Kabupaten Luwu Timur sebagai daerah yang mempunyai sumber daya alam yang cukup menjanjikan apabila dikembangkan menjadi daerah agrobisnis dan agrowisata.
2. Keberadaan partai politik, organisasi kemasyarakatan dan LSM sebagai wadah penyalur aspirasi dan perjuangan masyarakat Luwu Ttimur untuk ikut serta berkiprah dalam proses demokratisasi, mendukung pembangunan daerah dan pelaksanaan otonomi daerah.
3. Potensi partisipasi masyarakat tinggi dalam bidang pembangunan ekomoni social dan budaya.
4. Koordinasi lintas propinsi dalam mewujudkan stabilitas politik, keamanan dan ketertiban masyarakat.

5. Kerjasama dan komunikasi dengan stakeholders guna mendukung pembangunan daerah.
6. Toleransi antar umat beragama di Kabupaten Luwu Timur sangat tinggi sehingga setiap ada permasalahan dapat diselesaikan dengan musyawarah melalui Forum Koordinasi Antar dan intra Umat Beragama.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

Dalam pelaksanaan penyusunan Renstra SKPD diperlukan adanya identifikasi terhadap isu – isu strategis yang saat ini berkembang yang dampaknya cukup signifikan bagi SKPD dimasa yang akan datang. Kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian besar, atau suatu kondisi / keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dengan melihat capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada periode 2010-2015 serta tantangan yang semakin berat pada 2016-2021, maka inventarisasi permasalahan yang dihadapi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur adalah sebagaiberikut:

- a. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik baik secara kuantitas maupun kualitas.
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas pekerjaan. Hal tersebut akan berdampak kepada kecepatan penyelesaian tugas.
- c. Masih adanya warga negara asing yang keluar masuk di Kabupaten Luwu Timur tanpa data yang lengkap.
- d. Adanya kelompok – kelompok atau organisasi yang membawa paham radikal yang dapat menimbulkan konflik di masyarakat.
- e. Mengantisipasi adanya pergesekan antar masyarakat maupun antar kelompok yang dilatarbelakangi oleh perbedaan suku, ras dan agama.
- f. Pemantauan situasi perkembangan politik yang terjadi di daerah.
- g. Kurangnya kesadaran organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang melaporkan ke pemerintahan melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik apabila memindahkan kantor sekretariatnya.

RENCANA STRATEJIK DAERAH (RENSTRA) TAHUN 2016-2021

- h. Adanya lembaga / organisasi kemasyarakatan yang melakukan aktifitas / kegiatan yang tidak sesuai dengan yang tertuang didalam AD/RT dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dikemukakan Permasalahan - permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah beserta Faktor-faktor yang mempengaruhinya :

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan ketertiban administrasi Warga Negara Asing (WNA)	Setiap orang asing tidak melaporkan keberadaannya kepada pemerintah	Masih kurangnya koordinasi dengan Kantor Imigrasi atau kurang berfungsinya Tim Pengawasan Orang Asing
2	Adanya pergerakan paham-paham radikal yang tidak melaporkan keberadaannya	Munculnya kegiatan-kegiatan keagamaan yang tidak sesuai dengan ajaran yang sebenarnya	Kelompok-kelompok tersebut menyebarkan paham-paham yang tidak sesuai dengan ajaran yang sebenarnya
3	Tertib administrasi bantuan keuangan kepada partai politik belum maksimal	Penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan tidak tepat waktu	Pengurus partai politik tersebar di kecamatan-kecamatan sehingga pengelolaan keuangan tidak maksimal
4	Kesekretariatan dan kegiatan Organisasi kemasyarakatan /LSM tidak sesuai yang ada dalam AD/RT	Pengurus organisasi kurang aktif melaporkan setiap perpindahan sekretariat	Setiap pergantian pengurus organisasi , maka pengurus baru selalu menginginkan agar organisasi itu dipindahkan sekretariatnya

3.2 Telaahan Visi, Misi & Program Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 mempunyai visi sebagai berikut : **"LUWU TIMUR TERKEMUKA 2021"**. Artinya melanjutkan pembangunan daerah menuju Kabupaten Luwu Timur yang lebih maju, sejahtera dan mandiri melalui penambahan ekonomi kerakyatan secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis sumber daya.

Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mengemban tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang kesatuan bangsa dan politik yang berkaitan langsung dengan misi mendorong berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar umat beragama.

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik termasuk ke dalam misi ke – 7 yaitu : “ Mendorong berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar umat beragama ” dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang religius senantiasa berpegang pada agama dan aturan demi terwujudnya kerukunan antar umat beragama di wilayah kabupaten luwu timur.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi

Pelaksanaan Renstra SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian / Lembaga atau Renstra SKPD Provinsi belum seluruhnya sinergis sehingga mengakibatkan lambatnya proses pelaksanaan pembangunan sektor kesatuan bangsa dan politik, maka kedepannya diperlukan wadah musyawarah rencana pembangunan pada tingkat regional maupun pusat yang lebih intensif dan sinergis guna percepatan pelaksanaan pembangunan.

Renstra Kementerian Dalam Negeri periode tahun berjalan telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 – 2019. Renstra Kementerian Dalam negeri difokuskan pada prioritas pemerintahan dalam negeri. Fungsi utama Kementerian Dalam Negeri periode 2015 – 2019 adalah sebagai berikut : (1) perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; (2) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian dalam negeri;

(3) pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab kementerian dalam negeri; (4) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian dalam negeri; (5) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan kementerian dalam negeri di daerah; (6) pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (7) pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri; (8) pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri; (9) pelaksanaan kegiatan tekhnis dari pusat sampai ke daerah; dan (10) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantive kepada seluruh unsure organisasi di lingkungan kementerian dalam negeri.

Renstra Kementerian Dalam Negeri periode tahun berjalan telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 – 2019 dan Rencana Strategis Prpoinisi Sulawesi Selatan 2014-2018, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur mengadopsi Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota merupakan alat pengaturan, pengendalian dan pengarahan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten/Kota dan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan. Untuk membantu mengupayakan perbaikan kualitas rencana tata ruang wilayah maka kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau Strategis Environmental Assesment (SEA) menjadi salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (framework of thinking) perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Luwu Timur (RTRWK) sampai saat ini yang berimplikasi terhadap laju pembangunan di daerah.

Selengkapnya dapat dilihat pada table 3.4.1 Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4.1

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur sebagai salah satu pendukung program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan keamanan di wilayah kabupaten luwu timur.	Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan serta masyarakat sangat mudah terpengaruh oleh paham – paham radikal yang banyak bermunculan saat ini hingga menimbulkan konflik di tengah–tengah masyarakat.	Maraknya bermunculan kelompok – kelompok yang membawa paham radikal. Masih kurangnya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah.	Menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat dan pemerintah. Berupaya menyelesaikan masalah agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Selalu bersatu dalam segala hal guna menjaga stabilitas politik dan keamanan.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Kabupaten Luwu Timur adalah Kabupaten yang mempunyai ciri khas kebhinekaan ras, suku, budaya dan agama yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Luwu Timur yang demokratis dan berwawasan kebangsaan. Secara umum terdapat beberapa masalah / isu – isu strategis yang akan dihadapi di masa kini dan masa yang akan datang :

1. Adanya pergesekan antar masyarakat maupun antar kelompok yang dilatarbelakangi oleh perbedaan suku, ras dan agama.
2. Adanya kesenjangan antar etnik / etnis yang ada di wilayah kabupaten luwu timur.
3. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap nilai – nilai pancasila.
4. Adanya kelompok – kelompok atau organisasi yang membawa paham radikal yang dapat menimbulkan konflik di masyarakat.
5. Banyaknya warga Negara asing yang keluar masuk di kabupaten luwu timur tanpa memiliki data yang lengkap.
6. Mengantisipasi perkembangan politik yang terjadi di daerah baik di luar maupun di dalam negeri.
7. Adanya lembaga / organisasi kemasyarakatan yang melakukan aktifitas / kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

RENCANA STRATEGIK DAERAH (RENSTRA) TAHUN 2016-2021

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Secara ringkas diuraikan tujuan dan sasaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai tugas pokok dan fungsi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Sebagai berikut :

Tabel 4.2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET BASELINE 2015	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					TARGET AKHIR RPJMD 2021
						2016	2017	2018	2019	2020	
						TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatkan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat		Cakupan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat	%	95,00	96,04	91,77	97,15	97,16	95,46	100%
		Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	Persentase Konflik Sosial yang ditangani	%	80,00	95,59	89,74	95,65	98,00	94,74	96,67
		Meningkatnya Politik Masyarakat	Persentase ORMAS, LSM OKP dan Parpol yang Aktif	%	90,00	96,25	93,80	98,65	96,32	96,18	96,32
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pelayanan SKPD	Nilai SAKIP	-	22	22	55	60	70	70	72

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan program-program yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur dalam mewujudkan visi dan misi kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Strategi dan arah kebijakan yang diterapkan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur adalah berdasarkan hasil metode analisa SWOT yaitu membandingkan antara factor eksternal Peluang (opportunities) dan Ancaman (Threts) dengan faktor internal Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weaknesses).

Tabel 5.1
Penentuan Alternatif Strategi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Luwu Timur

Faktor Internal Faktor Eksternal	<u>Kekuatan (Strength) :</u> Etos Kerja Pegawai yang cukup tinggi; Adanya peraturan Pemerintah yang menyatakan secara jelas peran/tupoksi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.	<u>Kelemahan (Weakness) :</u> Masih perlunya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; Terbatasnya penyediaan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan secara berkesinambungan; Minimnya sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kinerja aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik; Kurang sinkronnya program / kegiatan Kesbang Kabupaten dan Kesbang Provinsi.
	<u>Peluang (Opportunity) :</u> Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam perencanaan dan bidang lainnya; Kesempatan dalam membuat rancangan kegiatan yang mengarah pada kemajuan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; Adanya peraturan perundang-undangan yang jelas tentang perencanaan pembangunan daerah.	Peningkatan profesionalisme dan kapasitas SDM perencanaan melalui pendidikan dan pelatihan; Pemanfaatan anggaran semaksimal mungkin; Pemanfaatan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kinerja aparatur semaksimal mungkin; Tersinkronisasinya pelaksanaan program / kegiatan Kesbang Kabupaten dan Kesbang Provinsi.
	<u>Ancaman (Threats) :</u> Adanya pergesekan antar masyarakat maupun antar kelompok yang dilatar belakangi perbedaan Suku, Ras dan Agama; Menurunnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup berbangsa dan bernegara.	Peningkatan dalam penguatan dalam kehidupan bermasyarakat; Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara; Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah provinsi & pemerintah pusat.

RENCANA STRATEJIK DAERAH (RENSTRA) TAHUN 2016-2021

Adapun strategi dan kebijakan yang akan di lakukan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik untuk 5 (lima) tahun kedepan dalam menunjang visi, misi, tujuan dan sasaran terpapar pada tabel berikut :

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	Peningkatan pembinaan masyarakat yang religius dan toleransi dalam kehidupan beragama.	Peningkatan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Peningkatan kewaspadaan dalam rangka cegah dan tangkal dini terhadap potensi konflik. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka keamanan & ketertiban masyarakat.
	Meningkatnya Politik Masyarakat	Peningkatan sosialisasi dan pemantauan terhadap Ormas/LSM dan Partai politik	Melakukan monitoring terhadap Ormas / LSM dan Partai Politik serta pemantauan kegiatan yang dilakukan dan keberadaan kesekretariatan
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pelayanan SKPD	Melakukan penerapan sistem akuntabilitas kinerja	1. Penerapan proses kegiatan dan program terencana dari tahap proses awal penyusunan sampai dengan pelaksanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku 2. Melakukan monitoring, koordinasi, sinkronisasi, serta mengevaluasi kegiatan dan program yang dilaksanakan

BAB VI
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial-ekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan rencana kegiatan masyarakat serta pemangku kepentingan. Berdasarkan tugas dan fungsi utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai SKPD yang melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, maka dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2016 - 2021 melakukan program/kegiatan yang sesuai dengan Visi dan Misi SKPD agar seluruh sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dapat tercapai. Memperhatikan tugas dan fungsi serta kegiatan yang dilaksanakan, maka indikator kinerja pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 terpapar pada tabel berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Tahun 2016-2021

Visi Renstra : LUWU TIMUR TERKEMUKA 2021

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokas
								2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	11
	Meningkatkan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	Persentase konflik Sosial yang ditangani (%)				80,00	95,59	-	89,74	-	95,65	-	98,00	-	94,74	-	96,67	-	Kesbangpol	Kab. Lutim
				15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan ()	80	80	202,983,300	85	281,080,000	90	288,830,500	0	-	0	-	0	772,893,800	Kesbangpol	Kab. Lutim
					Penguatan Jaringan Intelejen Daerah (KOMINDA)	Jumlah Pertemuan KOMINDA (kali)	-	1	89,497,300	2	91,550,000	6	165,661,000	0	-	0	-	-	346,708,300	Kesbangpol	Kab. Lutim
					Forum Koordinasi Pengawasan Orang Asing Serta Pemantauan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing	Jumlah orang asing yang terpantau di wilayah kabupaten luwu timur (orang)	-	200	39,878,000	250	94,765,000	400	31,421,000	0	-	0	-	-	166,064,000	Kesbangpol	Kab. Lutim
					Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Jumlah pertemuan penanganan konflik sosial (kali)	-	0	-	0	-	1	91,748,500	0	-	0	-	-	91,748,500	Kesbangpol	Kab. Lutim
					Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri	Jumlah pertemuan tim terpadu penanganan gangguan keamanan dalam negeri (kali)	-	1	73,608,000	1	94,765,000	0	-	0	-	0	-	-	168,373,000	Kesbangpol	Kab. Lutim

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
								2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	11
				17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Tercapainya Jumlah masyarakat yang memiliki ideologi dan wawasan kebangsaan yang berlandaskan Pancasila dan UUD Thn 1945 ()	1	80	82,890,500	85	1,816,385,500	90	887,453,000	0	-	0	-	-	2,786,729,000	Kesbangpol	Kab. Lutim
					Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	Jumlah pertemuan forum FKUB (pertemuan)	-	2	82,890,500	1	131,838,000	2	112,440,500	0	-	0	-	-	327,169,000	Kesbangpol	Kab. Lutim
					Perkemahan Persaudaraan Generasi Muda Sulsel	Jumlah peserta yang mengikuti perkemahan persaudaraan (orang)	-	10	-	10	37,760,000	10	40,940,000	0	-	0	-	-	78,700,000	Kesbangpol	Kab. Lutim
					Pendidikan Bela Negara	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan bela negara (orang)	-	0	-	144	1,450,210,000	80	634,820,000	0	-	0	-	-	2,085,030,000	Kesbangpol	Kab. Lutim
					Gerakan Nasional Revolusi Mental	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi gerakan nasional revolusi mental (orang)	-	0	-	500	196,577,500	250	99,252,500	0	-	0	-	-	295,830,000	Kesbangpol	Kab. Lutim
				18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya tali silaturahmi antar etnis di masyarakat ()	13	13	76,374,500	13	76,055,000	13	69,726,000	0	-	0	-	-	222,155,500	Kesbangpol	Kab. Lutim
					Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Jumlah laporan (dokumen)	-	0	76,374,500	0	76,055,000	3	69,726,000	0	-	0	-	-	222,155,500	Kesbangpol	Kab. Lutim
						Jumlah etnis yang terdata di wilayah kabupaten luwu timur (etnis)	-	13		13		0		0		0		-		Kesbangpol	Kab. Lutim
				19	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Menurunnya konflik sosial di masyarakat ()	7	6	84,742,500	4	210,525	3	249,297,500	0	-	0	-	-	334,250,525	Kesbangpol	Kab. Lutim
					Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah pertemuan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (kali)	-	1	84,742,500	1	210,525	0	249,297,500	0	-	0	-	-	334,250,525	Kesbangpol	Kab. Lutim
						Jumlah tim informan yang tersebar di kecamatan (orang)	-	0		0		33		0		0		-		Kesbangpol	Kab. Lutim

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Reke ning	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana naan													Unit Kerja SKPD Penang- gungjawab	Lokasi
								2016		2017		2018		2019		2020		Kondial Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	11
				52	Program Pembinaan Kerukunan dan Kesatuan Bangsa	Persentase konflik Sosial yang difasilitasi 0	0	0	-	90	-	90	-	95	1,443,081,500	97	1,947,260,500	-	3,390,342,000	Kesbangpol	Kab. Lutim
					Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Jumlah Laporan (Dokumen)	-	0	-	0	-	0	-	4	69,726,000	4	100,000,000	-	169,726,000	Kesbangpol	Kab. Lutim
					Pendidikan Bela Negara	Jumlah Peserta Bela Negara (orang)	-	0	-	0	-	0	-	136	634,820,000	140	664,820,000	-	1,299,640,000	Kesbangpol	Kab. Lutim
					Sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental	Jumlah peserta yang mengikuti Gerakan Revolusi Mental (orang)	-	0	-	0	-	0	-	250	91,136,500	250	250,000,000	-	341,136,500	Kesbangpol	Kab. Lutim
					Forum Koordinasi Pengawasan Orang Asing serta Pemantauan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing	Laporan Pengawasan dan pemantauan Orang Asing (dok)	-	0	-	0	-	0	-	4	25,000,000	4	50,000,000	-	75,000,000	Kesbangpol	Kab. Lutim
					Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama	Laporan FKUB yang ditindaklanjuti (Dok)	-	0	-	0	-	0	-	4	112,440,500	4	172,440,500	-	284,881,000	Kesbangpol	Kab. Lutim
					Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Jumlah laporan konflik sosial (dok)	-	0	-	0	-	0	-	4	95,000,000	4	150,000,000	-	245,000,000	Kesbangpol	Kab. Lutim
					Penguatan Tim Kewaspadaan Dini di Daerah	Jumlah Tim Kewaspadaan Dini daerah yang terbentuk	-	0	-	0	-	0	-	1	414,958,500	1	560,000,000	-	974,958,500	Kesbangpol	Kab. Lutim
		Meningkatnya Politik Masyarakat	Persentase ORMAS, LSM, OKP dan Parpol yang aktif (%)				90,00	96,25		93,80		98,65		96,32		96,18		96,32		Kesbangpol	Kab. Lutim
				21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Jumlah Kasus Politik yang difasilitasi ()	-	0	103,107,000	85	349,122,500	90	682,694,000	95	607,834,500	95	643,572,000	-	2,386,330,000	Kesbangpol	Kab. Lutim
					Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi Partai Politik, Ormas dan LSM ,	Jumlah ormas yang diawasi yang terdaftar di kab.Luwu Timur (ormas)	-	45	23,718,000	133	28,750,000	0	69,567,500	0	-	0	-	-	122,035,500	Kesbangpol	Kab. Lutim
						Jumlah SKT yang terbit (unit)	-	0		0		30		0		0		0		Kesbangpol	Kab. Lutim
					Rencana Penggunaan dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik	Jumlah laporan hasil verifikasi Dana Bantuan Parpol (Dok)	-	0	17,178,000	0	31,817,500	0	34,761,500	2	34,761,500	2	40,000,000	-	158,518,500	Kesbangpol	Kab. Lutim
						Jumlah Laporan pertanggung jawaban keuangan yang diverifikasi (parpol)	-	11		11		11		0		0		-		Kesbangpol	Kab. Lutim

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja SKPD Penang-gungjawab	Lokasi
								2016		2017		2018		2019		2020		Kondial Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	11
					Peningkatan Kapasitas SDM Pengurus Partai Politik dan Masyarakat	Jumlah pengurus Parpol dan Masyarakat yang mengikuti Peningkatan Kapasitas SDM (orang)	-	0	-	0	-	0	-	170	179,004,500	170	179,004,500	-	358,009,000	Kesbangpol	Kab. Lutim
					Pemantauan Situasi Politik Daerah	Jumlah Laporan Pemantauan (Dok)	-	11	-	11	40,130,000	4	42,164,000	4	42,164,000	4	45,000,000	-	169,458,000	Kesbangpol	Kab. Lutim
					Sosialisasi terhadap Pemilih Pemula	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pemilih pemula (orang)	-	0	-	0	-	300	58,345,000	350	58,345,000	350	70,000,000	-	186,690,000	Kesbangpol	Kab. Lutim
					Fasilitasi Desk Pemilihan Umum	Jumlah Tim Desk Pemilu (tim)	-	0	-	0	-	0	-	1	234,604,000	1	250,000,000	-	484,604,000	Kesbangpol	Kab. Lutim
					Pertemuan Ormas dan LSM dengan pemerintah daerah dan Sosialisasi	Jumlah ormas/LSM, dan OKP yang mengikuti Sosialisasi (orang)	-	100	41,906,000	100	36,620,000	150	48,007,500	0	-	0	-	-	126,533,500	Kesbangpol	Kab. Lutim
					Pendidikan Politik bagi Anggota Partai Politik	Jumlah peserta yang mengikuti diklat pendidikan politik bagi anggota partai politik (orang)	-	0	-	120	184,040,000	120	150,262,000	0	-	0	-	-	334,302,000	Kesbangpol	Kab. Lutim
					bimbingan teknis pelaporan pertanggungjawaban keuangan bagi bendahara partai politik	Jumlah Bendahara dan pengurus parpol yang mengikuti bimtek (orang)	-	50	20,305,000	50	27,765,000	50	36,662,500	0	-	0	-	-	84,732,500	Kesbangpol	Kab. Lutim
					Desk Pilkada	tersedianya Tim DESK PILKADA (tim)	-	0	-	0	-	1	242,924,000	0	-	0	-	-	242,924,000	Kesbangpol	Kab. Lutim
					Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi Ormas dan LSM ,	Jumlah SKT yang terbit (unit)	-	0	-	0	-	0	-	95	58,955,500	95	59,567,500	95	118,523,000	Kesbangpol	Kab. Lutim
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan OPD	Nilai SAKIP				0	22	-	57	-	60	-	65	-	70	-	-	-	Kesbangpol	Kab. Lutim
				1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	90	95	468,649,000	95	591,184,100	97	606,970,100	97	608,497,515	100	603,567,100	-	2,878,867,815	Kesbangpol	Kab. Lutim
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat keluar masuk yang diagendakan (bh)		0	-	0	-	0	-	313	2,500,000	350	2,500,000	-	5,000,000	Kesbangpol	Kab. Lutim
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan (rekening)	-	3	21,300,000	3	42,000,000	0	36,000,000	0	30,789,915	0	38,000,000	-	168,089,915	Kesbangpol	Kab. Lutim

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
								2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	11
						Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi,SDA dan listrik yang terbayarkan (rekening)	-	0		0		36		36		36		-		Kesbangpol	Kab. Lutim
					Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah aparatur administrasi keuangan yang terbayarkan (orang)	-	0	-	5	31,680,000	5	51,600,000	0	-	0	-	-	83,280,000	Kesbangpol	Kab. Lutim
					Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan (orang)	-	0	-	0	16,000,000	1	16,000,000	1	16,000,000	1	19,000,000	-	67,000,000	Kesbangpol	Kab. Lutim
						Jumlah gedung kantoryang dibersihkan (unit)	-	0		1		0		0		0		-		Kesbangpol	Kab. Lutim
					Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara (unit)	-	21	10,000,000	21	11,000,000	24	15,750,000	28	15,600,000	35	20,600,000	-	72,950,000	Kesbangpol	Kab. Lutim
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan (jenis)	-	0	-	0	-	0	-	45	13,580,100	50	13,580,100	-	27,160,200	Kesbangpol	Kab. Lutim
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Jenis)	-	0	1,500,000	0	1,200,000	6	1,235,000	7	1,750,000	7	3,000,000	-	8,685,000	Kesbangpol	Kab. Lutim
						Jumlah bangunan kantor yang diberikan penerangan (unit)	-	1		1		0		0		0		-		Kesbangpol	Kab. Lutim
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah koran/majalah yang disiapkan (Eksamplar)	-	3	3,480,000	6	6,600,000	0	6,180,000	0	6,180,000	0	6,600,000	-	29,040,000	Kesbangpol	Kab. Lutim
						Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan (Eksamplar)	-	0		0		90		90		90		-		Kesbangpol	Kab. Lutim
					Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum yang disediakan (kotak)	-	0	-	0	-	0	-	900	19,250,000	900	19,250,000	-	38,500,000	Kesbangpol	Kab. Lutim
					Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan (kali)	-	40	186,641,000	0	204,915,000	58	205,165,000	70	266,054,500	80	220,000,000	-	1,082,775,500	Kesbangpol	Kab. Lutim
						Jumlah rapat koordinasi yang diikuti (kali)	-	0		40		0		0		0		-		Kesbangpol	Kab. Lutim

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja SKPD Penangungjawab	Lokasi
								2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	11
					Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis yang terbayarkan (orang)	-	8	104,000,000	10	132,000,000	10	138,000,000	10	138,000,000	10	153,000,000	-	665,000,000	Kesbangpol	Kab. Lutim
					Penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan SKPD	jumlah penunjang administrasi kesekretariatan SKPD yang terpenuhi (Jenis)	-	0	141,728,000	0	59,852,100	8	57,967,100	0	-	0	-	-	259,547,200	Kesbangpol	Kab. Lutim
						Jumlah penunjang administrasi kesekretariatan yang terpenuhi (%)	-	95		95		0		0		0		-		Kesbangpol	Kab. Lutim
					Kunjungan kerja dalam daerah	jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan (kali)	-	0	-	200	85,937,000	394	79,073,000	397	77,756,000	415	87,000,000	-	329,766,000	Kesbangpol	Kab. Lutim
					penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Jenis)	-	0	-	0	-	0	-	3	21,037,000	3	21,037,000	-	42,074,000	Kesbangpol	Kab. Lutim
				2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang terpenuhi ()	-	90	483,250,000	100	151,250,000	100	126,000,000	100	158,000,000	100	188,000,000	-	1,106,500,000	Kesbangpol	Kab. Lutim
					Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan (unit)	-	1	392,750,000	0	-	3	80,000,000	2	80,000,000	2	80,000,000	-	632,750,000	Kesbangpol	Kab. Lutim
					Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (unit)	-	3	40,800,000	5	100,000,000	3	15,000,000	5	25,000,000	5	45,000,000	-	225,800,000	Kesbangpol	Kab. Lutim
					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)	-	1	15,000,000	1	17,250,000	1	16,000,000	1	35,000,000	1	18,000,000	-	101,250,000	Kesbangpol	Kab. Lutim
					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit)	-	2	34,700,000	1	34,000,000	3	15,000,000	3	18,000,000	4	45,000,000	-	146,700,000	Kesbangpol	Kab. Lutim

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja SKPD Penang-gungjawab	Lokasi
								2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	11
				3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur Yang Mendapatkan Pakaian Dinas, Pakaian Kerja Lapangan dan Hari-hari Tertentu ()	95	100	8,820,000	0	-	100	5,250,000	100	5,750,000	100	35,250,000	-	55,070,000	Kesbangpol	Kab. Lutim
					Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	jumlah aparatur yang yang mendapatkan pakaian dinas beserta kelengkapannya (pasang)	-	17	8,820,000	0	-	0	-	0	-	25	25,000,000	-	33,820,000	Kesbangpol	Kab. Lutim
					Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	jumlah aparatur yang mendapatkan pakaian khusus hari hari tertentu (Pasang)	-	0	-	0	-	20	5,250,000	25	5,750,000	25	10,250,000	-	21,250,000	Kesbangpol	Kab. Lutim
				4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya ()	10	1	47,000,000	1	77,000,000	9	52,370,000	9	24,500,000	9	132,000,000	-	332,870,000	Kesbangpol	Kab. Lutim
					Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah aparat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (orang)	-	0	-	0	-	0	-	0	-	4	15,000,000	-	15,000,000	Kesbangpol	Kab. Lutim
					Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	jumlah aparat yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (orang)	-	0	-	0	-	0	-	0	-	5	40,000,000	-	40,000,000	Kesbangpol	Kab. Lutim
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	jumlah aparat mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (orang)	-	8	47,000,000	8	77,000,000	8	52,370,000	10	24,500,000	10	77,000,000	-	277,870,000	Kesbangpol	Kab. Lutim
				5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu ()	0	100	-	100	4,000,000	100	4,090,000	100	8,590,000	100	9,000,000	-	25,680,000	Kesbangpol	Kab. Lutim
					Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun (dokumen)		1	-	1	4,000,000	1	4,090,000	1	4,090,000	1	5,500,000	-	17,680,000	Kesbangpol	Kab. Lutim

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja SKPD Penanggunjawab	Lokasi
								2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	11
					Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun (dokumen)		0	-	0	-	0	-	3	4,500,000	3	3,500,000	-	8,000,000	Kesbangpol	Kab. Lutim
				6	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD yang tersusun tepat waktu (%)	0	0	-	100	7,000,000	100	8,116,000	100	8,116,000	100	9,500,000	-	32,732,000	Kesbangpol	Kab. Lutim
					Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang disusun (dokumen)	-	9	-	9	7,000,000	9	8,116,000	9	8,116,000	9	9,500,000	-	32,732,000	Kesbangpol	Kab. Lutim
		TOTAL							1,557,816,800		3,353,287,625		2,980,797,100		2,864,369,515		3,568,149,600		14,324,420,640		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial-ekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan rencana kegiatan masyarakat serta pemangku kepentingan. Berdasarkan tugas dan fungsi utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai SKPD yang melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, maka dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2016 - 2021 melakukan program/kegiatan yang sesuai dengan Visi dan Misi SKPD agar seluruh sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dapat tercapai. Memperhatikan tugas dan fungsi serta kegiatan yang dilaksanakan, maka indikator kinerja pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 terparap pada tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD 2021
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase konflik sosial yang tertangani	80	95,59	89,74	95,65	98,00	94,74	96,67	96,67
2	Persentase ORMAS, LSM, OKP dan Parpol yang Aktif	90	96,25	93,80	98,65	96,32	96,18	96,32	96,32
3	Nilai SAKIP	22	22	55	60	70	70	72	72

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016 – 2021 merupakan suatu rencana yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Renstra ini disusun dengan memperhatikan perkembangan situasi, kondisi dan potensi yang ada di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik secara khusus dan kondisi dan potensi yang ada di Kabupaten Luwu Timur pada umumnya. Penyusunan Rencana Strategis ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur. Hasil pelaksanaan dari renstra akan menjadi tolok ukur keberhasilan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pencapaian sasaran yang diinginkan. Tolok ukur ini terlihat dari laporan kinerja yang disampaikan pada setiap akhir tahun anggaran melalui penilaian realisasi kinerja program/kegiatan. Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ini pada hakekatnya untuk keselarasan dan kesinambungan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021. Oleh karena itu diharapkan Rencana Strategis ini dapat dijalankan sesuai dengan rencana dan didukung oleh seluruh sumber daya aparatur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur secara umum.

Malili, Januari 2018

Kepala Kantor


GUNTUR HAFID S.Pd., M.Si
Pangkat Pembina
NIP : 19710502 199208 1 001